



P E N E T A P A N

Nomor 570/Pdt.P/2020/PA.SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang diajukan secara ecourt telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Nawir Patu bin Patu, tempat tanggal lahir Tancung, 14 April 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lopping, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, **disebut Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 570/Pdt.P/2020/PA.Skg, tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari perempuan Mursida binti Nawir Patu;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Mursida binti Nawir Patu, tanggal lahir 29 Mei 2003 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Lopping, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan laki-laki bernama Muh. Akib bin Labeddu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan peternak ayam ras, tempat kediaman Jl. H. Mustamin Dusun III Desa Tanete, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Hal. 1 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.200/Kua.21.24.14/PW.01/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1038/DINSOSP2KBP3A tanggal 13 Agustus 2020;

4. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sappa, dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/5731/Pusk Sp tanggal 14 Agustus 2020;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Muh. Akib bin Labeddu sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Muh. Akib bin Labeddu tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Akib bin Labeddu berstatus **duda cerai mati** dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Muh. Akib bin Labeddu telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan /dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Hal. 2 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Mursida binti Nawir Patu untuk menikah dengan laki-laki bernama Muh. Akib bin Labeddu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi ijazah terakhir anak Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikahnya pendidikan anak akan berhenti, setelah menikah anak tersebut besar kemungkinan akan hamil, sedangkan organ reproduksinya belum siap, secara ekonomi, social dan psikologi anak belum siap menghadapi semuanya sehingga potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Dan anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, anak Pemohon serta calon suaminya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Buktisuratberupa:

Hal. 3 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Nomor B.200/Kua.21.24.14/PW.01/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mursida Nomor 731307-LT-24112010-0009 tanggal 24 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sappa dengan No. 440/5731/Pusk Sp tanggal 14 Agustus 2020, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P3;
4. Asli surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/1038/DINSOSP2KBP3A tanggal 13 Agustus 2020, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P4.

SAKSI- SAKSI :

Saksi kesatu, Emma binti Paronda, umur 33 tahun, agama Islam, mengaku sepupu satu kali Pemohon, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Mursida binti Nawir Patu, karena anak Pemohon mau menikah dengan Muh. Akib bin Labeddu sedangkan umurnya baru 17 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Hal. 4 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus duda cerai mati;

Saksi kedua, Marhani binti Paronda, umur 43 tahun, agama Islam, mengaku sepupu satu kali Pemohon, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Mursida binti Nawir Patu, karena anak Pemohon mau menikah dengan Muh. Akib bin Labeddu sedangkan umurnya baru 17 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa ada penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus duda cerai mati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B.200/Kua.21.24.14/PW.01/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

Hal. 5 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran calon suami cucuk Pemohon, dengan demikian maka sudah terpenuhi maksud Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bahwa mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Mursida**), P3 (Asli surat keterangan dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sappa) dan P4 (Asli Penolakan Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 tersebut adalah akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur, maka baik bukti P1 sampai dengan bukti P4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan

Hal. 6 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama Mursida binti Nawir Patu, namun belum cukup umur, karena Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai mati, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, anak Pemohon tersebut masih berstatus anak karena belum berusia 18 tahun, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya kalau ada hal yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi bahwa anak Pemohon dengan dengan calon suaminya Keduanya telah menjalin hubungan **asmara selama 1 tahun** dan Pemohon serta orang tua calon suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang bias melanggar agama dan mempermalukan keluarga Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan surat Nomor B.200/Kua.21.24.14/PW.01/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut biladit hubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ۖ لِلْأُتْمَىٰ مِنْكُمْ وَلِصَالِحِينَ ۖ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعِينِهِمُ اللَّهُ ۖ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَسِعَ عِلْمُهُ ۚ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw haditsdari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفًا لِلَّهِ نِصْفًا لِلنَّسَبِ

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Hal. 8 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Kemadharatanituharusdihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

در الافاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan,

Hal. 9 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mursida binti Nawir Patu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Akib bin Labeddu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Makka A., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Arifin, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Makka A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).**

Hal. 10 dari 10 Disp. Kawin No.570/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)